

ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN
DI KABUPATEN SIDOARJO

Skripsi



Disusun oleh :

Risna Diani

Nim : 02112034

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA

2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	Latar
Belakang dan rumusannya	1
1.2	Penjelas
an Judul	8
1.3	Alasan
Penjelasan Judul	9
1.4	Tujuan
Penelitian	10
1.5	Manfaat
Penulisan.....	10
1.6	Metode
Penelitian	11
1.6.1	Jenis
Penelitian.....	11

1.6.2	Pendeka
tan Masalah.....	12
1.6.3	Sumber
Bahan Hukum.....	12
1.6.4	Teknik
Pengumpulan dan Pengolaan data	13
1.6.5	Analisa
Data.....	13
1.7	Pertang
gungjawaban Sistematika Penulisan	15
BAB II AKIBAT HUKUM ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN PEMERINTAH.....	17
2.1	Pengertia
n Tanah	16
2.1.1	Pengertia
n Tanah menurut para ahli	16
2.1.2	Pengertia
n Tanah Pertanian	18
2.1.3	Pengertia
n Tanah Non Pertanian	22
2.1.4	Pengertia
n Alih Fungsi Tanah Pertanian	24

2.2	Prosedur dan Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sidoarjo	34
2.2.1	Tata Cara permohonan alih fungsi	34
2.2.2	Pelaksanaan Alih fungsi Tanah	37
2.3	Akibat Hukum Alih Fungsi Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo	41
BAB III UPAYA-UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASI BANYAKNYA ALIH FUNGSI TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN PEMERINTAH		47
3.1	Pengendalian Alih Fungsi Tanah	47
3.2	Upaya Pengendalian yang dilakukuan Pemerintah Kab. Sidoarjo	52
BAB IV PENUTUP		52
A.	Kesimpulan	55
B.	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		57



ABSTRAK

Penelitian skripsi mempunyai tujuan untuk menganalisa alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dari tahun ke tahun peningkatan jumlah penduduk bertambah disitulah kebutuhan akan tanah untuk meningkat yang mengakibatkan semakin banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terjadi di Kabupaten Sidoarjo . Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Perda RTRW No.6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) , memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan pertanian tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui akibat hukum apakah jika terjadi alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah kabupaten Sidoarjo Untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi banyaknya alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yaitu pertama di dalam pelaksanaannya dinas-dinas yang terkait dalam tim teknis belum berfungsi sebagaimana mestinya dan akibat proses alih fungsi tanah pertanian menjadi pertanian tidak memenuhi syarat pemerintah kabupaten sidoarjo akan memberikan sanksi tegas sesuai Perda RTRW No.6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) . kedua dalam upaya pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di kabupaten Sidoarjo mempunyai kebijakan-kebijakan yaitu menerapkan pengaturan zonasi, pengaturan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi sehingga dapat diupayakan dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian dapat ditekan atau tidak terjadi

Kata Kunci : Alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian, Akibat Hukum, Pelaksanaan.

ABSTRACT

This research has the objective to analyze the conversion of agricultural land into non-agricultural in the district of Sidoarjo.. From year to year increase in the number of population increases that is where the need for land to increase the lead to more conversion of agricultural land into non-agricultural happened in Sidoarjo. In this case the Local Government through RTRW Bylaw 6 of 2009 on Spatial Planning Sidoarjo Regency Year 2009-2029 and Law No. 41 of 2009 on the Protection LP2B (Agricultural Land Sustainable Food), has a role in regulating and controlling the use of the agricultural land.

The purpose of this study is to To determine the legal consequences if the event of conversion of agricultural land into non-agriculture that do not meet the requirements set by the government, Sidoarjo To know what the government's efforts, Sidoarjo to overcome the number of conversion of use of agricultural land into non-agricultural The conclusion in the study of implementation is the first in the agencies involved in the technical team is not functioning as it should and as a result of the conversion of agricultural land into agricultural ineligible Sidoarjo district government will give strict punishment in accordance RTRW Bylaw 6 of 2009 on Spatial plan Sidoarjo Regency Year 2009-2029 and Law No. 41 of 2009 on the Protection LP2B (Agricultural Land Sustainable Food). both in the effort to control the conversion of agricultural land menadi non farm in Sidoarjo reserve the policies that apply settings zoning, licensing arrangements, provision of incentives and disincentives, and the imposition of sanctions that can be pursued in the control of conversion of agricultural land into non-agriculture could be reduced or not happen.

Keywords: transformation of agricultural land into non-agricultural, Effects, Implementation.

BAB IV

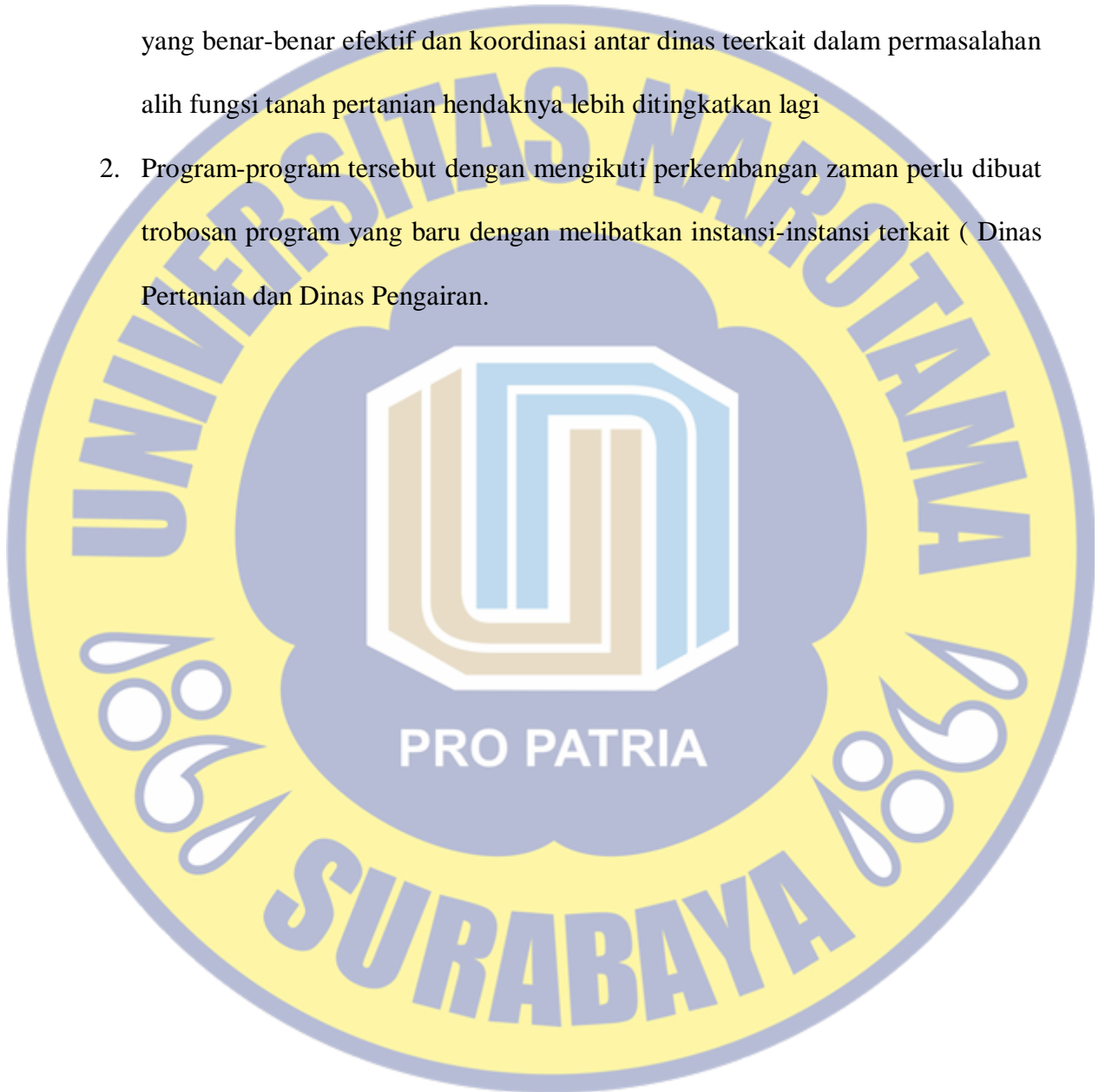
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Akibatnya apabila alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu nantinya akan berdampak pada iklim di Kabupaten Sidoarjo menjadi tidak bagus, tanah pertanian semakin lama akan berkurang. Pihak yang melanggar syarat-syarat dalam perubahan status tanah / alih fungsi tanah yang ditetapkan akan dikenai sanksi pada Undang-Undang No 41 Tahun 2009 dan Perda No 6 Tahun 2009 dan pada pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah pertanian dinas pertanian dan dinas teknis lainnya yang berperan penting dalam prose perubahan status tanah belum berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Upaya dalam pengendalian tanah agar tidak semakin banyak tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi tanah non pertanian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 yaitu penetapan peraturan zonasi, pengaturan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan penerapan sanksi.

4.2 Saran

1. Perlu adanya monitoring berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang benar-benar efektif dan koordinasi antar dinas terkait dalam permasalahan alih fungsi tanah pertanian hendaknya lebih ditingkatkan lagi
2. Program-program tersebut dengan mengikuti perkembangan zaman perlu dibuat trobosan program yang baru dengan melibatkan instansi-instansi terkait (Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arba. Muhammad. *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika), 2015
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, et. al, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985
- K.Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Muchin, Imam Koeswahyono. (2008) *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penetian Hukum*, 2009.
- Sudargo Gautama, *Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1981.
- T Suriaatmadja Toto, *hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah (bandung : nuansa)* 2013,hal 117
- .Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-2* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

JURNAL

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2013. Kabupaten Sidoarjo dalam Angka Tahun 2013. Sidoarjo, BPS
- , 2015. Kabupaten Sidoarjo
Angka Tahun 2015. Sidoarjo, BPS.
- Corolina, Linda Kristi. *Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan*. Jurnal. Malang : Fakultas Ilmu administrasi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah No.6 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029

Ketetapan-Ketetapan MPR Republik Indonesia 1983, Ketetapan MPR-RI no.
11/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bina Pustaka
Tama, Surabaya, 1988.

LAIN-LAIN

https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_pertanian diakses pada tanggal 20 maret 2016
jam 11.59

kolokiumkpmipb.wordpress.com diakses tanggal 01 Juni 2016 jam 14.00 wib

<https://liayuliyanti95.wordpress.com/2015/06/17/pengertian-tanah-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 16 Mei 2016 jam 17.00 wib

<http://www.caragampang.com/2014/08/pengertian-dan-definisi-tanah-menurut.html> diakses tanggal 17 Mei 2016 jam 21.00 wib

<https://agribisnis14.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan-pertanian/>
diakses tanggal 5 Juni 2016 jam 18.00 wib

